

REPOSITIONING PANCASILA DALAM PERGULATAN IDEOLOGI-IDEOLOGI GERAKAN DI INDONESIA PASCA-REFORMASI

Muhammad Aziz Hakim

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
mohammedazha@gmail.com*

Abstract

Setelah reformasi, Indonesia menjadi medan pertarungan ideologi-ideologi gerakan. Mulai dari ideologi gerakan yang muncul kembali setelah lama mati suri, maupun ideologi gerakan baru yang diimpor dari luar negeri. Kondisi ini sebagai akibat betapa para pejuang reformasi melupakan desain besar penataan negara ketika berjuang meruntuhkan orde baru. Dampaknya adalah ideologi-ideologi berebut dominasi dalam penataan negara Indonesia. Padahal di sisi lain Indonesia telah memiliki sebuah ideologi bernama Pancasila. Bagaimana memosisikan Pancasila dalam pergulatan ideologi-ideologi gerakan tersebut? Setidaknya ada empat pilihan, yakni memosisikan Pancasila sebatas kontrak sosial, memosisikan Pancasila sebagai common platform, meletakkan Pancasila sebagai visi bangsa dan negara, dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan agaknya, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara adalah pilihan yang paling tepat. Meskipun harus diikuti dengan berbagai pra-syarat yang harus terpenuhi.

[After the reformation, Indonesia became a battlefield of ideologies movement. Starting from the ideological movement that emerged after a long torporor the new ideological movement imported from abroad. This condition is as the result of that the reformers forgot the master plan of the country's arrangements when fighting to undermine the new order. The impacts are that the ideologies fighting for the dominance in structuring the Indonesian government. Yet on

the other hand Indonesia has an ideology called Pancasila. How to put the Pancasila in such a struggle of ideologies movements? There are at least four options, namely Pancasila is put in limited social contract position, Pancasila as a common platform, Pancasila as the nation's vision, and Pancasila as the ideological state. And it seems that putting Pancasila as the ideological state is the most appropriate choice, although it must be followed by a range of pre-conditions that must be met.]

Keywords: *Pancasila, The ideology of the movement, Liberalism, Socialism, Islamism*

Pendahuluan

Perbincangan seputar Pancasila kembali mengemuka. Pemantiknya adalah kembali maraknya berbagai organisasi yang mengusung ideologi gerakan yang berbeda, atau bahkan bertolak belakang dengan Pancasila. Kondisi ini merupakan alarm bagi eksistensi Pancasila di bumi Indonesia.

Salah satu faktor membuncahnya ideologi gerakan adalah keran kebebasan yang dibuka lebar pada era reformasi. Sejatinya, jika kita melakukan restrospeksi, maka jalan liberalisasi politik yang ditempuh para aktor politik pada tahun 1998 sebenarnya tidak salah. As'ad Said Ali menyebutkan bahwa mengacu pada pengalaman banyak negara, proses transisi demokrasi umumnya selalu dimulai dengan liberalisasi politik. Kebijakan ini penting sebab prasyarat pokok sebuah negara demokrasi memang harus ada kebebasan politik. Di samping itu, kebebasan politik dapat menjadi penanda yang jelas dengan rezim sebelumnya yang serba otoritarian.¹

Akan tetapi, menurut As'ad, yang tidak disadari adalah kebebasan politik pada dasarnya tetap membutuhkan platform bersama sebagai pegangan. Semacam konsensus para elit tentang bagaimana masa depan demokrasi, bagaimana sistem politik baru harus ditata dan seterusnya. Platform bersama inilah yang nyaris absen pada awal gerakan reformasi.

¹ Asad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm.viii-ix

Konsentrasi para elit saat itu, lebih tercurah bagaimana merubuhkan rezim dan belum sempat memikirkan bagaimana kehidupan politik dan sosial pascarezim otoritarian ditata dan dikelola.²

Para elit politik pun gagap manakala rezim runtuh dalam waktu sekejap. Tidak ada waktu lagi untuk berkontemplasi menyusun konsep perubahan dan penataan negara. Jalan pintas pun ditempuh, dibukalah keran liberalisasi politik dan segera menyelenggarakan pemilu.³

Selanjutnya, euforia pun terjadi. Elit politik berbondong-bondong mendirikan partai politik.⁴ Para tokoh masyarakat pun menjadi rebutan untuk menduduki posisi strategis dalam struktur partai politik mulai dari tingkat nasional/pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota. Fokus elit politik pun beralih pada bagaimana memenangkan pemilu yang segera digelar.⁵

Di tengah suasana euforia itulah, ideologi-ideologi yang hampir mati mendapat ruang gerak baru. Bahkan, liberalisasi politik ini juga mengundang ideologi trans-nasional ikut masuk dalam dinamika kehidupan rakyat. Memanfaatkan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, kekuatan-kekuatan ideologi itu kemudian berusaha menemukan modus operandi baru. Polanya bisa

² *Ibid.* hlm. ix.

³ Keputusan tentang segera menyelenggarakan pemilu ini ditetapkan pada Sidang Istimewa MPR RI pada 10-13 November tahun 1998. SI MPR juga menetapkan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan pada Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999 dan selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Lihat Pasal I Poin 4 TAP MPR RI No XIV/MPR/1998.

⁴ Hingga April 1999 tercatat berdiri 181 Partai Politik. 141 Partai Politik di antaranya tercatat di dalam Lembaran Negara dan memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman sebagai Partai Politik. Pada akhirnya, verifikasi KPU terhadap 141 Partai Politik tersebut menghasilkan 48 Partai Politik yang dinyatakan secara sah sebagai peserta Pemilu 1999. Saifullah Ma'shum, *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001) hlm. 15-27

⁵ Dalam disertasinya, Kuskrido Ambhardi menggambarkan dengan apik betapa para tokoh fokus pada pertarungan memenangkan Pemilu 1999. Di samping strategi kemenangan, Kuskrido juga mengungkap asal muasal dan ideologi Partai Politik pada tahun 1999 itu. Kuskrido Ambhardi, *Mengungkap Politik Kartel* (Jakarta: KPG, 2009), hlm 125-233

melalui partai politik (baru atau lama) atau masih menyukai model gerakan sosial. Tujuannya ada yang langsung untuk merebut kekuasaan melalui jalur demokratis, ada pula yang berusaha merebut kekuasaan melalui jalur non-demokratis. Ada pula gerakan ideologi yang sekadar memengaruhi proses politik dan kebijakan.⁶

Demikianlah, para penggerak reformasi seolah terjebak pada suasana euforia yang berkelanjutan. Sehingga platform dasar terlupakan. Pada akhirnya, Indonesia bak *battle ground* ideologi gerakan dunia.

Ideologi: Sebuah Pengertian

Ideologi adalah sebuah kata yang sukar dipahami. David McLellan (1995) menyebut, *Ideology is the most elusive concept in the whole of the social sciences*.⁷ Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti 'gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita'. Kata 'idea' berasal dari kata bahasa Yunani 'eidos' yang artinya 'bentuk'. Di samping itu ada kata 'idein' yang artinya 'melihat'. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, 'idea' disamakan dengan 'cita-cita'.⁸

Koento Wibisono sebagaimana dikutip oleh Noor Ms Bakri menyebutkan bahwa setiap ideologi selalu bertolak dari suatu keyakinan filsafati tertentu, yaitu pandangannya tentang apa, siapa, dan bagaimana manusia itu sebagai pendukungnya, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi dalam konteks hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dan negara, baik dalam dimensi material maupun dimensi spiritualnya.⁹

Senada dengan Koento Wibisono, Roeslan Abdulgani memberikan

⁶ Ali, *Ideologi*, hlm. xii

⁷ Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, (Macmillan: 1992)

⁸ Kaelan MS, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm. 50-51

⁹ Noor Ms Bakri, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

gambaran yang menarik mengenai keterkaitan filsafat dengan ideologi. Roeslan menyebutkan bahwa filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat dalam pengertian yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief system*) yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Hal itu berarti bahwa filsafat telah beralih dan menjelam menjadi ideologi.¹⁰

Lebih lanjut Koento Wibisono menyebutkan ideologi memiliki beberapa unsur pokok. *Pertama*, unsur keyakinan. Setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. *Kedua*, unsur mitos. Setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau beberapa orang sebagai kesatuan, yang secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana sesuatu hal yang ideal itu pasti akan dapat dicapai. *Ketiga*, unsur loyalitas. Setiap ideologi selalu menuntut adanya kesetiaan serta keterlibatan optimal para pendukungnya. Untuk mendapatkan derajat penerimaan optimal, dalam ideologi terkandung juga adanya tiga sub unsur, yaitu rasional, penghayatan, dan susila.¹¹

Dalam perspektif lain, ideologi memiliki tiga dimensi. Yudi Latif menyebutkan bahwa ideologi harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. *Pertama*, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. *Kedua*, ideologi mengandung semacam

¹⁰ Kaelan MS, *Filsafat*, hlm. 55

¹¹ Bakri, *Pendidikan*, hlm. 178-179

paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. *Ketiga*, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkrit.¹²

Terence Ball menggambarkan ideologi dengan cukup menarik. Ia menyebut, “*an ideology is a fairly coherent and comprehensive set of ideas that explains and evaluates social conditions, helps people understand their place in society, and provides a program for social and political action. An ideology, more precisely, performs four functions for people who hold it: the (1) explanatory, (2) evaluative, (3) orientative, and (4) programmatic functions.*”¹³ Ideologi dalam pengertian Yudi Latif dan Terrance Ball inilah yang digunakan dalam artikel ini.

Pancasila Perjalanan sebuah “Ideologi”

Dalam perjalanan sejarahnya, proses Pancasila menjadi ideologi negara menempuh langkah nan panjang. Pancasila mengalami metamorfosa peran. Sehingga wajar jika muncul pertanyaan sejak kapan Pancasila menjadi ideologi negara. Sebuah pertanyaan yang muncul manakala membincang tentang ideologi negara Indonesia. Onghokham dan Andi Achdian menelusuri bagaimana Pancasila berkembang menjadi “ideologi negara”. Mereka menengarai wacana Pancasila sebagai “ideologi negara” bersifat komprehensif baru berkembang pada awal dekade 1960-an.¹⁴ Dalihnya adalah perdebatan sengit yang terjadi pada sidang-sidang BPUPK¹⁵ dan PPKI. Merujuk pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945:

¹² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2014), hlm. xvii-xviii.

¹³ Terrance Ball dkk, *Political Ideologies And The Democratic Ideal*, (New Jersey: Perason, 2013), hlm. 5

¹⁴ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslabatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 17

¹⁵ Pada artikel ini digunakan akronim BPUPK bukan BPUPKI sebagaimana lazimnya digunakan. Pencantuman kata “Indonesia” tidaklah tepat, karena badan ini dibentuk oleh Rikugun (Angkatan Darat Jepang) yang wewenangnya meliputi pulau Jawa dan Madura saja. RM. A.B Kusuma, *Labirnya UUD 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1.

Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari “weltanschauung” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setuju, Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang Saudara Sadoesi setuju, yang Saudara Abikoeno setuju, yang Saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi **kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.**¹⁶

Kalimat **“kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju”** dalam bahasa ilmu politik modern tidak lain adalah kontrak sosial. Pada dasarnya teori kontrak sosial berasal pada abad pencerahan dengan J.J. Rousseau sebagai tokohnya. Berbeda dengan Thomas Hobbes yang memandang perlunya suatu pemerintah yang kuat, dan John Locke yang memandang kebebasan individu perlu dilindungi, Rousseau lebih menekankan pada keinginan umum (*general will*). Oleh karena itu, untuk menciptakan dan memelihara tertib sosial, lalu dibentuk suatu pemerintahan yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan kehendak umum.¹⁷ Jadi, Pancasila dianggap sebagai “kontrak sosial” warga negara Indonesia.

Meskipun sejak awal Soekarno menekankan bahwa Pancasila adalah “weltanschauung”, kalangan nasional lain menganggapnya berbeda. Pancasila hanya sebatas suatu kesepakatan politik di antara tokoh-tokoh nasional.¹⁸ Pasca Proklamasi, istilah Pancasila meredup. Pancasila kalah populer dibanding dengan “daulat rakyat” atau kedaulatan rakyat. Hal ini bisa dimaklumi mengingat periode 1945-1949, Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.¹⁹ Dalam periode ini, Indonesia dihiasi dengan berbagai peristiwa politik dan perjuangan rakyat.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 156

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 28

¹⁸ Ali, *Negara*, hlm. 20

¹⁹ *Ibid.*,

Terdapat dua jalan yang ditempuh, diplomasi dan gerilya.²⁰

Pada akhirnya, perjuangan diplomasi berujung dengan disepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam Konferensi Meja Bundar. Ditetapkan pula konstitusi yang baru, bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS).²¹ Dalam Mukaddimah KRIS ini, Pancasila mengalami perubahan rumusan. Rumusan itu adalah “ke-Tuhanan Yang Maha-Esa, peri-Kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.”

Periode berikutnya, bentuk negara kembali berubah, dari negara serikat kembali menjadi negara kesatuan. Konstitusinya pun berubah, dari KRIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.²² Pancasila dalam UUDS 1950 ini sama persis dengan rumusan pada Mukaddimah KRIS.

Terkait perubahan rumusan Pancasila dalam dua konstitusi itu, ternyata tidak ada reaksi yang berlebihan dari para elit nasional. Minimnya reaksi tokoh-tokoh elit nasional saat itu menandakan bahwa Pancasila bukan doktrin pokok yang layak diperdebatkan, sehingga saat terjadi perubahan redaksional tidak banyak yang mempersoalkan.²³

Awal dekade 1950-an muncul upaya reinterpretasi terhadap Pancasila. Dalam upaya ini terdapat dua golongan yang berbeda dalam memandang Pancasila. Golongan pertama berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial. Bagi golongan ini, Pancasila adalah filsafat sosial atau “weltanschauung” bangsa. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi inspirasi utama meletakkan Pancasila dalam posisi yang sangat mendasar itu. Muhammad Yamin, salah

²⁰ Dalam perjuangan ini Soekarno-Hatta masuk dalam kelompok yang pro diplomasi, sedangkan Tan Malaka dan Soedirman sebagai kelompok yang pro gerilya dan menentang diplomasi. Arif Zulkifli, dkk, *Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan*, (Jakarta: KPG, 2010), hlm. 42

²¹ Keputusan Presiden RIS Nomor 48, tanggal 31 Januari 1950. Lembaran Negara No 50-3

²² UU Nomor 7 Tahun 1950.

²³ Ali, *Negara*, hlm. 21

seorang tokoh nasional yang mendukung pandangan ini, menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar rohani dan “weltanschauung” bangsa.²⁴

Golongan kedua berpendapat bahwa Pancasila adalah sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah perdebatan yang muncul dalam persidangan BPUPK dan PPKI. Pancasila saat itu benar-benar menjadi kompromi politik di antara golongan nasionalis sekuler dan nasionalis agama mengenai dasar negara. Sebagai kompromi politik, tidak pada tempatnya bila Pancasila ditransformasikan menjadi asas politik, filsafat politik, ideologi politik, atau bentuk-bentuk lainnya. Sidik Djojokusarto dan Sutan Takdir Ali Syahbana adalah di antara tokoh yang mendukung pemahaman ini.²⁵

Perdebatan seputar Pancasila, lebih tepatnya, dasar negara kembali mengemuka Pasca Pemilu 1955. Sebagaimana dimaklumi bahwa, UUDS tahun 1950 mengamanatkan pembentukan konstitusi yang dilaksanakan oleh suatu badan bernama Konstituante. Pasal 134 UUDS Tahun 1950 menyebutkan, “Konstituante (Badan Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.”

Setelah Konstituante terbentuk, dengan segera perdebatan seputar dasar negara menyeruak. Sejatinya, kondisi ini dipicu dari eksekusi pertarungan politik menuju Pemilu 1955. Dalam konstituante sendiri terdapat tiga kelompok besar yang masing-masing mendukung falsafah negara tertentu. Pertama, blok Pancasila yang menganggap bahwa kelima sila “Ketuhanan, peri-Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan sosial” merupakan dasar negara. Kedua, blok Islam yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Ketiga, blok Sosial-Ekonomi yang mengajukan ekonomi sosialis dan demokrasi sesuai dengan Pasal

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23

²⁵ *Ibid.*,

33 dan Pasal 1 dari UUD 1945 sebagai dasar negara.²⁶

As'ad Said Ali berpandangan bahwa perdebatan keras ini terjadi karena interpretasi terhadap Pancasila berbeda-beda antar berbagai golongan. Perbedaan ini terutama menyangkut sila Ketuhanan yang ditafsirkan secara bebas. Soekarno dan M. Yamin cenderung meletakkan periketuhanan dalam pengertian sosiologis. Ketuhanan tidak terikat dengan agama manapun alias netral agama. Bahkan, PKI menafsirkan lebih jauh, dengan mengusulkan mengganti sila pertama dengan kebebasan beragama dan kepercayaan.²⁷ Berpijak pada realitas inilah, golongan Islam merasa dikhianati. Maka ada upaya untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta.

Pada akhirnya, Konstituante mengalami deadlock, gagal mengambil keputusan. Sejatinya, kegagalan Konstituante dapat dipahami. Komposisi keanggotaan konstituante menunjukkan kekuatan yang berimbang dari dua blok besar, nasionalis dan Islam. Blok nasionalis memiliki 274 kursi, blok agama menggenggam 230 kursi, sedangkan Blok Sosial-Ekonomi 10 kursi.²⁸ Dari komposisi ini, perdebatan dasar negara tidak ada yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Kegagalan konstituante menimbulkan kekecewaan banyak pihak. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959.²⁹ Salah satu isi dekrit adalah kembali kepada UUD 1945.³⁰

Presiden Soekarno berusaha menekankan bahwa Pancasila adalah

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 32

²⁷ Ali, *Negara*, hlm. 26-27

²⁸ Nasution, *Aspirasi*, hlm. 32-33

²⁹ Disertasi Adnan Buyung Nasution menganggap bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Bagi Adnan Buyung, Konstituante telah berjuang keras menyusun Konstitusi. Konstitusi hampir rampung. Hanya menyisakan perdebatan sedikit, termasuk dasar negara. Disertasi ini mematahkan mitos bahwa demokrasi parlementer telah gagal di Indonesia sebagaimana ditunjukkan kegagalan Konstituante. *Ibid.*, hlm. xix-xx

³⁰ Di samping menetapkan UUD 1945 berlaku lagi, Dekrit juga menetapkan pembentukan MPRS dan DPAS.

satu-satunya alat pemersatu dan jawaban terhadap berbagai persoalan bangsa. Pada dasarnya, upaya ini sudah dilakukan Soekarno sebelum dekrit 1959. Dalam sebuah kesempatan, Soekarno menyatakan:

Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya. (Soekarno, 1958).

Penekanan ini jelas menunjukkan bahwa Soekarno berusaha meletakkan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang konklusif. Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapakan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya.³¹ Upaya ini tercapai ketika Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dengan dicetuskannya “Manipol/USDEK”.³² Manifesto Politik (Manipol) adalah materi pokok pidato

³¹ Wasino, *Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok*, makalah disampaikan dalam Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia” diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Departmen Kebudayaan dan Pariwisata, di Gedung LPMP, Semarang, tanggal 30-31 Maret 2009

³² Ali, *Negara*, hlm. 30

Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato ini ditetapkan oleh DPA sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berikutnya, materi pidato itu dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) No 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No 1/MPRS/1960 tentang GBHN.

Adapun USDEK merupakan akronim dari “U” adalah UUD 1945, “S” adalah Sosialisme Indonesia, “D” adalah demokrasi terpimpin, “E” adalah ekonomi terpimpin, dan “K” adalah Kepribadian Indonesia. USDEK ini adalah materi pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960 dengan judul “Djalannya Revolusi Kita (Jarek)”. Menurut Soekarno, USDEK adalah intisari dari Manipol.³³ Dengan demikian, Pancasila dengan “Manipol/USDEK” menjadi ideologi negara yang bersifat tunggal.

Manipol-USDEK benar-benar memiliki daya pikat bagi banyak masyarakat politik. Masyarakat politik ini, yang didominasi pegawai negeri, sudah lama mendukung apa yang selalu ditekankan presiden mengenai kegotong-royongan, menempatkan kepentingan nasional diataskepentingan golongan dan kemungkinan mencapai mufakat melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran.³⁴

Situasi ini berlangsung hingga Presiden Soekarno lengser. Meskipun demikian, pergantian rezim tidak lantas mengubah Pancasila sebagai “ideologi negara”. Rezim Soeharto tetap memposisikan Pancasila sebagai “ideologi negara”. Hanya saja, tafsir terhadap Pancasila dirumuskan ulang. Penafsiran Soekarno terhadap Pancasila dengan “Manipol/USDEK”nya tidak dipakai kembali. Situasi dapat dipahami, mengingat satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan golongan antikomunis hanyalah Pancasila.³⁵

Penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara secara tersirat termaktub dalam Ketetapan MPRS No XX/1966. Dalam ketetapan ini,

³³ *Ibid.*, hlm. 32

³⁴ Wasino, *Demokrasi*, hlm. 34

³⁵ *Ibid.*, hlm. 35

Pancasila disebutkan sebagai “sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini bisa dimaknai bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar paling fundamental, sehingga mampu menjadi pandangan hidup (*world view*) dan visi masa depan. Artinya, Pancasila tidak hanya sekadar ditempatkan sebagai “dasar negara” yang akan menjadi nafas dalam hubungan politik kenegaraan, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa.³⁶

Periode berikutnya, pada tahun 1978 metode penghayatan terhadap Pancasila dibakukan melalui Ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketetapan ini dimaksudkan sebagai “penuntun pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara”. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ini menjadi tafsir tunggal terhadap Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila telah sepenuhnya menjadi sebuah ideologi yang komprehensif: Pancasila adalah jiwa dan kepribadian, Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian luhur, Pancasila adalah dasar negara, dan seterusnya.³⁷

Perjalanan berikutnya, Presiden Soeharto melangkah lebih jauh. Ia betul-betul menjadi tokoh sentral. Bahkan, Soeharto seolah menegaskan sebagai negara itu sendiri.³⁸ Dengan posisi ini, Soeharto menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang komprehensif dan memonopoli kebenaran. Negara atau Soeharto adalah penafsir tunggal Pancasila. Tiada ruang gerak bagi ideologi-ideologi lain. Dan sayangnya, proses “penjagaan” terhadap Pancasila ini dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Sejarah pun kemudian mencatat, Pancasila dengan tafsir tunggal negara itu ikut “runtuh” bersamaan dengan tumbangya Presiden Soeharto dan orde baru.³⁹

³⁶ *Ibid.*, hlm. 38

³⁷ *Ibid.*, hlm. 40

³⁸ Menurut kajian Jeffrey Winters, Soeharto telah menjadi oligark. Soeharto dimasukkan dalam tipologi oligarki sultanik. Jeffrey A. Winters, *Oligarki* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 206-215

³⁹ Fakta ini terlihat dari Sidang Istimewa MPR RI November 1998 yang mencabut Ketetapan tentang P4, melalui TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998

Ideologi Gerakan di Indonesia

Beberapa pemikir mengungkapkan “the end of ideology” seperti Aron (1953), Tingsten (1955), Kircheimer (1957), dan Bell (1960). Meskipun demikian, ternyata ideologi tetaplah hidup. Menurut Eiken (1964) kematian ideologi adalah mustahil. Karena, kegiatan politik manusia tidak dapat dilepaskan dari agenda dan kepentingan politik yang diturunkan dari prinsip dasar dan falsafah berpolitik. Maka, munculah tesis “never ending ideology”.⁴⁰ Realitas inilah yang dihadapi Indonesia. Kini, Indonesia bak battle ground ideologi dunia.

As’ad Said Ali menyebutkan bahwa paling tidak terdapat lima tipologi besar ideologi politik yang secara aktual menjadi orientasi politik berbagai kelompok gerakan di Indonesia selama masa reformasi ini.⁴¹ Empat di antaranya bersumber dari pemikiran Barat, dan satu lagi bersumber dari gagasan keagamaan (Islam). Kelima tipologi ideologis itu memiliki varian masing-masing yang saling berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Kelima tipologi ideologis itu adalah kiri-radikal, kiri-moderat, kanan-konservatif, kanan-liberal dan islamisme.⁴²

1. Ideologi Kiri Radikal

a. Varian-varian Anarkis Marxisme

Sejatinya, wacana marxis radikal sebenarnya tidak percaya pada demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya hanya menguntungkan kaum kapitalis liberal. Mereka menginginkan mobilisasi politik kelompok-kelompok tertindas, khususnya buruh dan petani, kedalam unit-unit gerakan sosial-politik proletariat industri dan proletariat agraris.

tentang Pencabutan Tap MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Lihat *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 1998*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.

⁴⁰ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. xxxvii-xliii

⁴¹ Ali, *Ideologi*, hlm. x

⁴² *Ibid.*,

Mengenai relevansinya dengan era sekarang, mereka berpandangan bahwa Marxisme sebagai gerakan dan doktrin politik akan selalu relevan sepanjang kapitalisme tetap menjadi persoalan.⁴³

Gagasan-gagasan radikal Marxis umumnya ditemui di kalangan aktifis organisasi rakyat berbasis sektoral-proletar, seperti buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota. Beberapa varian anarkis dari kelompok ini berada di bawah tanah, hanya muncul dalam situasi-situasi kekacauan sosial, dan mempunyai banyak jaringan gerakan kiri internasional. Ada juga dari kalangan radikal ini yang mempercayai metode politik parlementer, contohnya PRD.⁴⁴

Di samping itu, gagasan ini juga banyak ditemui pada golongan Anarko-Sindikalisme yang merupakan cabang dari anarkisme yang mengonsentrasikan diri pada gerakan buruh. Dalam gerakan buruh, anarko-sindikalisme berpegang pada prinsip solidaritas pekerja (*workers solidarity*), aksi langsung (*direct action*), dan manajemen mandiri buruh (*Workers self-management*). Kelompok-kelompok anarko-sindikalis di Indonesia seperti Taring Padi, Jaker, Gerbong Bawah Tanah, Kelomppok Ikarus, Balanak, dan sebagainya.⁴⁵

b. Populisme Kiri

Tidak seperti liberalisme atau Marxisme, populisme bukanlah sebuah bentuk ide politik yang nyata dan koheren. Tetapi ia juga tidak bisa didefinisikan secara gampang sebagai suatu gerakan politik yang sekadar memuaskan massa dengan mendorong proposal-proposal kebijakan yang simplistik.⁴⁶

Persyaratan untuk demokrasi populis-kiri adalah persamaan sosial dan ekonomi. Seperti wacana Marxis, isunya bukan hanya politik tetapi juga ekonomi. Bentuk demokrasi dan demokratisasinya sama dengan

⁴³ Ali, *Ideologi*, hlm. 16

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23

⁴⁶ Jan-Werner Mueller, "Populisme tanpa Rakyat", *Konstelasi* Vol. 7 No. 36 Desember 2013

Marxis; bedanya wacana ini mentolerir partisipasi elite menyangkut “kepentingan rakyat”.⁴⁷ Populisme kiri menginginkan bentuk demokrasi partisipatoris, sementara setrategi demokratisasinya adalah dari bawah. Isi wacana demokrasi Marxis terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang bersifat emansipatoris. Pada tingkat taktis mereka berusaha menciptakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan borjuasi demokratis, sebagian menggunakan metode tradisional, seperti populisme mileniaristik dan model-model patronase tradisional. Di Indonesia, populisme kiri seperti terlihat dari gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).⁴⁸

2. *Ideologi Kiri Moderat*

Sejatinya, ideologi kiri moderat sudah tumbuh sangat lama di Indonesia. Ideologi ini pada masa Orde Baru umumnya tumbuh di kalangan gerakan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada era reformasi, terdapat dua jenis ideologi kiri moderat yang berkembang di Indonesia, yakni sosial demokrasi dan jalan ketiga (gerakan sosial baru).⁴⁹

a. Sosial Demokrasi

Di Indonesia, wacana atau ideologi sosial demokrasi mengalami pasang surut. Pada masa awal-awal kemerdekaan, ideologi sosial demokrasi relatif berkembang dengan baik, menjadi bahan perdebatan di kalangan founding fathers, dan bahkan berdiri pula Partai Politik Sosdem yang ikut dalam kontestasi pemilu. Pada masa Orde Baru, dalam bahasa Arie Sujito, ideologi sosial demokrasi mengalami “mati suri”. Ia tumbuh dalam gerakan-gerakan bawah tanah dalam bentuk soft subversif. Di era reformasi, ideologi ini mulai kembali berkembang meskipun ada usaha-usaha alumni Orde Baru untuk katakanlah menghalangi perkembangan sosial demokrasi. Berbagai policy sosial mengandung spirit sosial demokrasi, tetapi sayangnya hal itu belum

⁴⁷ AE Priyono, “Islam dalam Oposisi Demokatis Indonesia”, *Studia Islamika* Vol 2 Nomor 4 tahun 1995

⁴⁸ Ali, *Ideologi*, hlm. 25

⁴⁹ *Ibid.*,

bisa dikodifikasikan dengan baik.⁵⁰

Sosial demokrasi merupakan gerakan sosialisme yang semula berdasarkan Marxisme. Sejak timbulnya revisionisme yang dikemukakan oleh Edward Bernstein (1850-1932) dan dipertahankan oleh Karl J. Kautsky (1854-1938), kemudian gerakan ini semakin melepaskan ajaran Marx yang bercorak revolusioner. Sosial demokrasi berpegang teguh pada asas demokrasi dan menentang diktatur kaum proletariat yang ada pada komunisme. Menurut penganut sosial demokrasi, masyarakat harus dikepalai oleh satu pemerintah yang dipilih bersama-sama secara demokratis, tidak hanya pada lingkup politik tetapi termasuk di bidang ekonomi karena semua proses dalam sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari diperlukannya ketertiban ekonomi.

Bentuk demokrasi dari wacana ini adalah lembaga-lembaga perwakilan: sementara bentuk demokratisasinya dari dua arah: atas dan bawah. Agenda mereka yang terutama adalah menyangkut persoalan-persoalan redistribusi. Gagasan pokoknya adalah tentang welfare state serta kombinasi antara persamaan sosial dan pasar ekonomi.⁵¹ Di Indonesia, gerakan ini melalui jalur partai dan non partai. Perjuangan melalui jalur partai di antaranya adalah Partai Rakyat Prima,⁵² dan Partai Buruh Sosial Demokrat.⁵³ Sedangkan yang berjuang melalui gerakan non partai di antaranya adalah Gerakan Rakyat Indonesia, Pemuda Sosialis Jakarta,⁵⁴ Pergerakan Sosialis, Perhimpunan Indonesia, dan Uni Sosial Demokrat.

b. Jalan Ketiga, Gerakan Sosial Baru

⁵⁰ Tim Redaksi, "Menulis Bibel Sosial Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sosial Demokarki* Vol. 11 4 April - Juli 2011

⁵¹ Ali, *Ideologi*, hlm. 25

⁵² Partai Rakyat Prima diketuai oleh Aris Budianto dan disahkan melalui SK. Menteri Kehakiman Nomor M.UM.06.08-166 tanggal 24 Pebruari 1999. Berita Negara Nomor 24 Tanggal 23 Maret 1999

⁵³ Partai Buruh Sosial Demorkat diketuai oleh Mukhtar Pakpahan dan disahkan melalui SK Menteri Kehakiman Nomor M.UM.06.08-104 Tgl. 04 Juli 2001 Berita Negara Nomor 61 Tanggal 31 Juli 2001

⁵⁴ Pemuda Sosialis Jakarta diketuai oleh Robertus Robert dideklarasikan di Jakarta pada 27 Oktober 2000

Pada dasarnya wacana ini adalah varian dari sosial demokrasi, khususnya untuk konteks di luar Eropa. Mereka melakukan rekayasa gerakan sosial di luar rumus-rumus ortodoks Marxisme, karena kenyataan bahwa proletarianisasi tidak hanya berlangsung di kelas buruh dan petani seperti yang diyakini kaum Leninis dan Maois. Lebih dari itu, mereka masih menginginkan adanya peranan negara yang besar untuk redistribusi kekayaan. Mereka juga percaya pada jalan demokrasi, untuk memungkinkan wakil-wakil masyarakat yang tidak diuntungkan oleh sistem kapitalisme terepresentasi secara politik. Mengapa disebut jalan ketiga, karena mereka mencari jalan tengah antara kapitalisme yang berbasis pada mekanisme pasar dan sosialisme yang berbasis pada negara. Jalan tengah yang dimaksudkan itu adalah manfaat maksimal dari pasar sekaligus dari negara.⁵⁵

3. Ideologi Kanan-Konservatif

a. Konservatif Elitis

Robert Nisbet menyebut bahwa ideologi konservatif merupakan salah satu dari tiga ideologi besar dunia. Dua yang lain, menurut Nisbet, adalah liberalisme dan sosialisme.⁵⁶ Konservatif elitis mensyaratkan adanya ketertiban sosial. Isunya terbatas pada sistem politik. Mereka menginginkan bentuk demokrasi elitis dan melihat demokratisasi dari atas sebagai yang paling mungkin. Kandungan wacana konservatisme elitis bisa macam-macam, bisa menampung nilai-nilai apapun. Aktor dan wacana ideologi ini lazim ditemukan di kalangan pembangkang elit, yakni mereka menolak yang menolak reformasi, sebagian ada juga di kalangan aktor garis-lunak di lingkungan rezim. Mereka sangat terobsesi oleh gagasan tentang stabilitas sosial yang dijaga oleh negara yang kuat.⁵⁷ Forum-forum yang sering digunakan untuk mengkampanyekan kepentingan politik

⁵⁵ Ali, *Ideologi*, hlm. 27

⁵⁶ Edgar F. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, (New York: McMillan Reference, 2000) hlm. 159

⁵⁷ Ali, *Ideologi*, hlm. 45

konservatisme-elitis di antaranya adalah Perhimpunan Kebangsaan, Gerakan Revolusi Nurani⁵⁸ dan lain-lain.

b. Nasionalisme Puritan

Idelogi nasionalisme adalah suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh yang menggerakkan. Merupakan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi suatu komunitas nasional. Para penyebar ideologi ini mengatributkan kepada negara mereka suatu identitas kultural yang khas yang menetapkan bahwa negara itu terpisah dari negara-negara lain dan memberikan suatu tempat khusus di dalam proses historis.

Nasionalisme puritan di Indonesia melihat bahwa Indonesia dalam ancaman separatisme dan konflik-konflik komunal berbasis agama dan etnis. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kembali ke UUD 1945, dan sistem otoritarianisme terbatas, dianggap sebagai solusinya. Mereka menginginkan tipe demokrasi yang juga elitis, meski mengakui representasi politik berbagai golongan politik asal masih dalam koridor NKRI. Mereka menginginkan negara yang kuat dengan dukungan militer. Wacana dan aktor-aktor yang mengusung gagasan ideologis ini lazim ditemukan di kalangan elit lama, kelompok-kelompok militer garis keras, partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik nasionalis.⁵⁹ Forum-forum yang sering dijadikan wahana pengembangan tujuan politiknya di antaranya adalah Dewan Revolusi, dan Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya,⁶⁰ Perhimpunan

⁵⁸ Gerakan Revolusi Nurani ini mendorong kembali kepada UUD 1945 sebagaimana Dekrit 5 Juli 1959. Gerakan ini dipimpin oleh Tyasno Sudarto. Aidul Fitirciada Azhari, "Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945: dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2006, hlm. 158 - 171

⁵⁹ Ali, *Ideologi*, hlm. 46

⁶⁰ Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya (GKIR) merupakan kelanjutan dari Barisan Kebangkitan Rakyat Indonesia (BKRI). Bergabung dalam GKIR antara lain FPP-45 dengan tokohnya Saiful Sulun, Indemo dengan tokohnya Hariman Siregar, Asosiasi Pejuang Indonesia dengan tokohnya Nugroho Djajusman, Forum Rektor dengan tokohnya Sofian Effendi dan lain-lain. Bambang Wiwoho, *Kaji Ulang UUD 45 (Penamaan Yang Manipulatif) Yang Sudah Diamandemen*, <http://www.swarasenayan.com/kaji-ulang-uud-45-penamaan-yang-manipulatif-yang-sudah-diamandemen/> diunduh 20 Mei 2016.

Nasionalis Indonesia (Pernasindo).⁶¹

4. *Ideologi Kanan-Liberal*

a. Liberalisme

John Stuart Mill mengatakan, “over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.” Kalimat John Stuart Mill dalam bukunya *On Liberty* ini yang menjadi dasar memahami liberalisme. Dalam pandangan liberal, manusia adalah rasional, masing-masing memiliki kepentingan, dan memiliki kemampuan bersaing. Implikasinya, manusia akan mampu hidup dalam sebuah kebebasan. Liberalisme mendorong kebebasan individu dengan memberikan persamaan kesempatan dalam sebuah masyarakat yang toleran.

Dengan kata lain, liberalisme berkeyakinan mengenai pentingnya kemerdekaan setiap individu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karena itu, menurutnya, semua manusia memiliki hak yang sama di depan hukum yang dimaksudkan bagi kemerdekaan sipil. Sedangkan tujuan utama dari setiap pemerintahan adalah mempertahankan kebebasan, persamaan dari semua warga negara, serta adanya kebebasan berpikir dan berekspresi.⁶²

Tipe ideologis semacam ini mempersyaratkan ekonomi pasar, dan membatasi isunya menyangkut sistem politik saja. Bentuk demokrasi dan demokratisasinya adalah demokrasi liberal, yang menginginkan peranan negara yang terbatas dan peranan swasta yang kuat, terutama sektor bisnis. Agenda utamanya adalah privatisasi. Demokrasi liberal ini banyak ditemukan di kalangan berbagai tokoh elit dari kalangan politisi; dan sebagian aktivis gerakan sosial berbasis NGO dan CSO. Secara potensial

⁶¹ Pernasindo dideklarasikan oleh 88 tokoh nasional. Kwik Kian Gie menjadi Ketua Presidium. Di antara deklaratornya adalah Ali Sadikin, Asvi Warman Adam, Christianus Siner Key Timu, Guruh Soekarnoputra, Jaya Suprana, dan Marissa Haque. Perhimpunan ini berkeinginan mendorong kemandirian bangsa. <http://news.detik.com/berita/613090/kwik-wiranto-cs-deklarasikan-perhimpunan-nasionalis-indonesia> diunduh 20 Mei 2016.

⁶² Ali, *Ideologi*, hlm. 47

juga muncul dukungan lebih kuat pada gagasan-gagasan liberal di kalangan sebagian kelas menengah, khususnya di kalangan akademisi lulusan barat.⁶³

b. Neoliberalisme

Menurut As'ad Said Ali, neoliberalisme adalah varian liberalisme dimana pada perkembangannya ideologi ini terpecah, satu bagian mendekati sosialisme, disebut New Liberalism (Liberalisme Baru), dan bagian lainnya mendekati kapitalisme (ekonomi), disebut Neoliberalisme.⁶⁴ Pembagian ini agak berbeda dengan Terrance Bell yang membagi varian liberalisme menjadi neo-classical liberalism, welfare liberalism, dan libertarian anarchism.⁶⁵

Istilah 'neo-liberalisme' yang luas digunakan dewasa ini pada mulanya adalah nama yang dipakai para pejuang demokrasi di Amerika Latin untuk menggambarkan watak ideologis kolusi antara rezim kediktatoran dan ekonomi pasar-bebas dalam coraknya yang ekstrem. Ekonomi-politik rezim Pinochet di Chile (1973-1990) menjadi model par excellence yang dimaksud para pejuang itu. Dari sana istilah 'neo-liberalisme' menyebar. Ketika kediktatoran mulai surut di benua itu, istilah 'neo-liberalisme' dipakai untuk menunjuk kinerja ekonomi pasar-bebas dalam coraknya yang ekstrem, meskipun negeri seperti Chile tidak lagi memakai sistem ekonomi pasar bebas se-ekstrem rezim Pinochet.⁶⁶

Beberapa prinsip Neoliberalisme di antaranya adalah (1) perkembangan ekonomi yang berkelanjutan adalah fundamental untuk mencapai kemajuan umat manusia, (2) pasar bebas merupakan tempat alokasi sumber daya yang paling efektif, (3) peran minimal intervensi negara baik dalam hubungan sosial dan ekonomi, (4) kebebasan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 48

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 49

⁶⁵ Terrance Ball, *Political Ideologies and The Democratic Ideal* (New Jersey: Preason, 2013), hlm. 83

⁶⁶ B. Herry-Priyono, *Neoliberalisme dan Sifat Elusif* Kebebasan, makalah disampaikan pada Refleksi yang disampaikan dalam acara "Pidato Kebudayaan" Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006

perdagangan dan permodalan.⁶⁷ Varian ini paling kuat memengaruhi dinamika politik Indonesia sejak reformasi. Elit pengusaha nasional berorientasi global terutama yang melakukan *joint-venture* dengan modal asing, sebagian para pejabat urusan keuangan dan perdagangan, termasuk yang mengurus privatisasi, adalah jenis kalangan elit pendukung neolib, termasuk lembaga *think-tank-nya*.⁶⁸

5. *Islamisme*

a. Islam Modernis

Ciri utama ideologi Islam modernis adalah berusaha memajukan Islam melalui pengembangan gagasan-gagasan rasionalisme, liberalisme, dan modernisme. Ada yang berorientasi politik dan biasanya kalangan ini mengembangkan partisipasi politik demokratis di dalam masyarakat muslim melalui partai-partai. Ada pula yang menempuh jalan kultural dan biasanya berkonsentrasi pada pengembangan masyarakat sipil dan menolak Islam-politik.⁶⁹ Terdapat dua varian dari islam modernis, yakni liberal dan radikal.

Varian liberal dari Islam modernis percaya bahwa mereka harus mengambil posisi untuk melakukan sekularisasi politik dan ekonomi. Sekularisasi politik dilakukan dengan cara memisahkan agama dari negara; sementara sekularisasi ekonomi dengan cara memisahkan ekonomi dari negara. Contoh yang baik dalam varian ini adalah Paramadana, yang mendasarkan pandangan keagamaannya dan politiknya pada fikiran Nurcholis Madjid.⁷⁰

⁶⁷ Ali, *Ideologi*, hlm. 49

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 50

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 64

⁷⁰ Paramadana resmi berdiri pada 31 Oktober 1986. Tujuan Paramadana adalah memungkinkan bangsa Indonesia, khususnya kaum Muslim, menghadapi masa depannya dan memanfaatkan Islam sebagai sumber yang kaya akan nilai-nilai bersama, yang bisa menjadi dasar pembangunan pribadi, kelembagaan dan nasional Indonesia. Kini Paramadana telah berkembang pesat. Salah satunya memiliki lembaga pendidikan bernama Universitas Paramadana. Lihat <http://paramadina.or.id/sejarah/> diunduh 20 Mei 2016

Contoh lain yang paling telanjang adalah Jaringan Islam Liberal (JIL).⁷¹ Para eksponen kelompok ini benar berasal kalangan tradisionalis (NU); namun dilihat pandangan-pandangannya mereka telah jauh dari tataran tradisionalisme.⁷²

Sementara varian radikal dari modernisme Islam, sebaliknya menolak westernisasi dan sekularisasi. Penolakannya terhadap paradigma sekularisasi terutama terletak pada sifat deterministiknya, bahwa dunia harus dibebaskan dari nuansa keagamaan, dan mustahil sebuah masyarakat menjadi modern kalau tidak sekuler dulu. Inilah yang ditolak. Mengenai paradigma rasionalisme mereka menerima, bahkan baginya Islam harus dikembangkan dengan gagasan-gagasan rasionalisme. Varian-varian radikal ini banyak yang kemudian terjatuh menjadi fundamentalis anti-Barat. Contoh varian ini banyak ditemukan pada kelompok-kelompok Islam transnasional yang berkembang pascareformasi, salah satunya Ikhwanul Muslimin Indonesia.⁷³

b. Islam Tradisionalis-Konservatif

Ini adalah jenis ideologi Islamisme konservatif, meskipun secara politik bisa saja mengambil bentuk-bentuk modern atau fundamentalis. Inilah jenis islam arus-utama yang menjadi basis organisasi-organisasi sosial keagamaan yang besar, seperti Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah selama ini memang disebut kelompok modernis karena sifat paradigma keagamaannya cenderung pada rasionalisme; namun dalam perspektif ini, ideologi politiknya adalah konservatif yang terlihat dari bahwa sikap dasar politiknya lebih mengedepankan sikap moderat, kooperatif, dan tidak oposan serta bisa mengakomodasi ke dalam negara nasional. Sementara NU, sekalipun tradisi pemikiran politiknya selalu berubah sesuai tantangan

⁷¹ Kelompok ini mulai aktif pada tahun 2001 berawal dari kelompok diskusi maya (*milis*) yang tergabung dalam islamliberal@yahoo-groups.com dan kemudian membuat media on-line yaitu www.islamlib.com sebagai menyebarkan ide-ide mereka. Zuly Qodir, *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 5-7.

⁷² Ali, *Ideologi*, hlm. 66

⁷³ *Ibid.*, hlm. 66

yang dihadapi, namun pandangan dasarnya adalah tetap, bahwa prinsipnya negara dan pemerintah wajib ditaati dengan catatan sepanjang syariah dijamin dan kekufuran dicegah.⁷⁴

c. Transformisme Islam

Pengaruh pemikiran kiri di dalam Islam muncul di Indonesia di bawah payung Transformisme Islam. Dalam paham mereka ini, Islam harus menjadi kekuatan progresif dan transformatif dengan misi utama untuk menegakkan keadilan, membela sektor-sektor masyarakat marginal dan tertindas, dan melawan kezaliman dalam politik maupun ekonomi.⁷⁵

Islam transformisme sebagai sebuah gerakan memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, Islam transformis adalah Islam yang selalu berorientasi pada upaya mewujudkan cita-cita Islam, yaitu membentuk dan mengubah keadaan masyarakat kepada cita-cita Islam, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam.

Kedua, sesuai dengan karakter yang pertama, maka Islam transformis adalah paham Islam yang menuntut adanya keseimbangan antara pelaksanaan aturan-aturan yang bersifat formalistik dan simbolistik dengan misi ajaran Islam tersebut. Bahkan jika suatu aturan formalistik atau simbolik tersebut harus diubah, atau diberi makna baru yang sesuai dengan tujuan.

Ketiga, Islam transformis lebih ditujukan untuk mewujudkan cita-cita Islam, khususnya mengangkat derajat kaum du'afa atau orang-orang yang tertindas, dan juga diarahkan kepada menegakkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, sopan santun, kejujuran, dan keikhlasan, menegakkan nilai-nilai demokratis seperti *egaliter* (kesederajatan), *equality* (kesamaan kedudukan) dan sebagainya. *Keempat*, Islam transformis adalah Islam yang senantiasa memiliki concern dan respons terhadap berbagai masalah aktual yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 67

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 69

awal kedatangannya lima belas abad yang lalu.⁷⁶

Di Indonesia, para eksponen varian transformisme Islam hanya sedikit yang aktif dalam partai politik. Mereka yang berorientasi politik banyak membangun jaringan dengan gerakan-gerakan kelompok sosialis dan kelompok kiri lainnya. Di kalangan ini pandangan politik varian transformisme Islam dikenal sebagai sosialisme Islam dan umumnya menjadi motor ideologis bagi kelompok-kelompok gerakan yang berbasis Islam.⁷⁷

d. Islam Fundamentalis

Sumber-sumber ideologis fundamentalisme dalam Islam sangat beragam. Mereka juga sering disebut sebagai kelompok neo-revivalis, karena mengagendakan kebangkitan hegemoni Dunia Islam. Golongan ini menolak sekularisasi, westernisasi, dan bahkan modernisasi. Mereka juga cenderung menolak demokrasi, dan kemudian bergerak di bawah tanah serta berorientasi sangat-politis dengan basis jamaah yang eksklusif.⁷⁸

Menurut Ahmad Nur Fuad, fundamentalisme Islam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua: tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional diwakili oleh kelompok yang menekankan pendekatan literal dan skriptural terhadap sumber Islam, seperti Persatuan Islam (Persis), dan dalam konteks mutakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya.

Sementara itu, fundamentalisme modern atau neo-fundamentalisme dalam politik diwakili misalnya oleh partai politik Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan partai-partai Islam lain yang bercita-cita mendirikan “negara Islam” dengan dasar syari’ah dan ideologi Islam.⁷⁹

Sedangkan menurut As’ad Said Ali, kelompok ini secara keagamaan

⁷⁶ Lasijan, “Gerakan Transformisme Islam di Indonesia”, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

⁷⁷ Ali, *Ideologi*, hlm. 70

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Ahmad Nur Fuad, “Interrelasi Fundamentalisme dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer”, *Islamica*, Vol. 2, No. 1, September 2007

disebut Salafi. Mereka ingin menerapkan Islam sebagaimana kalangan *salaf* (kalangan terdahulu) dalam mengamalkan ajaran Islam. Mereka berusaha menggunakan metode (*manhaj*) *salafy* dalam memahami Islam dengan ciri utama kuatnya pendekatan tekstualis.⁸⁰

Di antara gerakan salafi ini adalah gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, dan sebagainya. Apabila dicermati lebih jauh, benang merah dari beragam gerakan tersebut adalah gerakan yang tumbuh di Timur Tengah dengan ciri dominan kuatnya interpretasi tekstualis.

Merenda Masa Depan Pancasila

Di tengah pertarungan antar-ideologi yang berkecamuk di Indonesia itu, haru ada upaya bagaimana memposisikan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejatinya, keprihatinan terhadap Pancasila dan realitas kebangsaan saat ini sudah banyak didiskusikan. Beberapa di antaranya menganggap bahwa problem Pancasila adalah terlalu surplus ucapan dan terlalu minus tindakan, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang akan kesaktian nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan sehari-hari.⁸¹ Oleh karena dirundung keraguan inilah, maka terdapat problem bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸²

Dalam konteks itu, Kuntowijoyo mengusulkan adanya proses “radikalisasi Pancasila”. Radikalisasi dalam arti ini adalah revolusi gagasan, demi membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini ditata-kelola dengan benar. Radikalisasi yang dimaksudkan adalah (1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, (2)

⁸⁰ Ali, *Ideologi*, hlm. 71

⁸¹ Latif, *Mata Air*, hlm. xviii

⁸² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 47

mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, (3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsial, dan korespondensi dengan realitas sosial, (4) Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan (5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.⁸³

As'ad Said Ali merangkum setidaknya terdapat empat gagasan dalam memosisikan Pancasila. *Pertama*, wacana Pancasila sebagai kontrak sosial dan bukan sebagai ideologi. Dengan diletakkan sebagai kontrak sosial, Pancasila tidak mungkin berbenturan dengan ideologi-ideologi atau pandangan dunia, baik yang bersifat sekuler maupun keagamaan. Gagasan ini diusung oleh Onghokham dan Andi Achdian.⁸⁴

Kedua, wacana Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila dimiliki bersama oleh beragam suku bangsa di Indonesia. Pancasila dapat berfungsi secara efektif sebagai perekat keberagaman masyarakat Indonesia. Fungsi itu hilang tatkala Pancasila diubah menjadi ideologi negara. Mochtar Pabottinggi adalah salah seorang penggagas Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Hampir mirip dengan Mochtar adalah Azyumardi Azra yang mengusulkan Pancasila sebagai common platform dan identitas nasional negara-bangsa Indonesia. Dengan cara seperti ini, Pancasila tetap efektif sebagai alat pemersatu bangsa.⁸⁵

Ketiga, wacana Pancasila sebagai visi bangsa dan negara. Pancasila adalah cita-cita atau harapan yang hendak diraih, bukan kondisi faktual sekarang. Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa terlalu banyak kondisi faktual yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai visi bangsa dan negara, Pancasila ibarat kompas yang membantu meluruskan langkah ke mana bangsa dan negara meluruskan langkah dan perjuangan. Penggagas Pancasila sebagai visi bangsa dan negara ini adalah Herry Priyono dan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 48

⁸⁴ Ali, *Pancasila*, hlm. 52

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 54

Achmad Fedyani Saifudin.⁸⁶

Keempat, wacana yang meletakkan Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara. Pancasila hanya berlaku di ruang publik dan atau di dalam domain politik. Pancasila hanya berlaku pada struktur dasar dari kehidupan kenegaraan, yaitu lembaga-lembaga politik, ekonomi dan sosial sebagai kesatuan skema kerjasama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan skema ini, ideologi-ideologi yang berada di dalam domain privat, golongan, atau asosiasi terbatas diperbolehkan hidup serta harus diakui dan dihormati negara.⁸⁷

Meskipun berbeda wacana, tetapi terdapat garis merah persamaan dari empat wacana tersebut. *Pertama*, tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang seyogyanya harus disegarkan dan dikontekstualisasikan. *Kedua*, tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin komprehensif yang mengatasi atau menolak ideologi lain. *Ketiga*, tidak menjadikan Pancasila sebagai kebenaran tunggal, monointerpretasi, dan justifikasi otoritarianisme negara.⁸⁸

Walaupun terdapat tiga benang merah yang menyambungkan antar-empat wacana tersebut, bagi penulis, gagasan bahwa Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara adalah gagasan yang cukup menarik. Salah satu argumentasinya adalah wacana Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara pada dasarnya sudah merangkum maksud dan tujuan tiga wacana sebelumnya. Artinya, ketika menjadi konsepsi politik atau ideologi negara, Pancasila dengan sendirinya merupakan kontrak sosial sebagaimana dimaksud oleh Onghokham dan Andi Achdian. Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara, secara langsung juga sebagai ideologi bangsa ala Mochtar Pabottinggi atau *common platform* sebagaimana pendapat Azyumardi Azra. Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai visi bangsa dan negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Herry Priyono

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 55

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 56

dan Achmad Fedyani Saifudin.

Meskipun demikian, memosisikan Pancasila sebagai konsepsi politik dan ideologi negara membutuhkan beberapa pra-syarat. *Pertama*, komitmen memosisikan Pancasila sebagai konsepsi politik dan ideologi negara pada ranah publik yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Artinya, dalam konteks kehidupan individual, ideologi-ideologi yang dianut oleh masing-masing warga negara atau kelompok warga negara bebas untuk dilaksanakan. Akan tetapi, jika sudah menyangkut kehidupan dalam konteks bernegara maka satu-satunya ideologi yang digunakan adalah Pancasila.

Oleh karena itu, diperlukan *double commitment* atau komitmen timbal balik dalam konteks ini. Komitmen pertama adalah negara menjamin berlangsungnya pelaksanaan ideologi yang dianut oleh masing-masing warga negara atau kelompok warga negara ketika pelaksanaan itu menyangkut wilayah privat, bukan wilayah publik kenegaraan. Adapun komitmen yang kedua adalah komitmen setiap warga negara atau kelompok warga negara untuk meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara dimana ideologi individual harus “mengalah” manakala berada pada wilayah publik kenegaraan. Di samping itu, perlu juga tambahan komitmen warga negara atau kelompok warga negara untuk menghormati dan menghargai pilihan ideologi warga negara atau kelompok warga negara yang lain. Karena absennya penghormatan dan penghargaan terhadap ideologi warga negara atau kelompok warga negara adalah awal bagi problematika memosisikan Pancasila sebagai ideologi negara.

Kedua, sebagai upaya mendorong terciptanya *double commitment* atau komitmen timbal balik itu adalah dengan menegaskan kembali bahwa Pancasila itu adalah satu kesatuan yang saling mengunci antar-Silanya. Tidak dikatakan Pancasila manakala menjalankan sila pertama dan lupa terhadap sila-sila lainnya. Begitu pula bukanlah Pancasila jika melaksanakan sila kedua tetapi menafikan sila-sila yang lainnya. Dan seterusnya. Pendek kata, pelaksanaan Pancasila harus menyeluruh tidak

parsial.

Ketiga, perlu merancang ulang bangunan strategi dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Selama ini banyak yang membahas Pancasila sebagai tuntunan normatif. Banyak buku yang telah tersusun dalam ranah normatif ini. Demikian pula pembahasan tentang Pancasila sebagai paradigma pengetahuan, meski tak sebanyak pada ranah tuntunan normatif, pembahasan dalam konteks ini dapat disebut tidak sedikit. Realitas yang memprihatinkan justru pada pembahasan tentang Pancasila pada dimensi tindakan. Pada titik inilah perlu bangunan strategi guna memperbanyak pembahasan dalam ranah Pancasila dalam dimensi tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANGAN

Konstitusi RIS.

UUD Sementara 1950.

TAP MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

TAP MPR RI No XIV/MPR/1998 Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 Tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden RIS Nomor 48, tanggal 31 Januari 1950. Lembaran Negara No 50-3.

BUKU

Ali, As'ad Said. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. Jakarta: LP3ES, 2000.

Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Ambhardi, Kuskrido. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: KPG, 2009.

Bakri, Noor Ms. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ball, Terrance. *Political Ideologies and The Democratic Ideal*. New Jersey: Perason, 2013.

Borgatta, Edgar F. *Encyclopedia of Sociology*. New York: McMillan Reference, 2000.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Heywood, Andrew. *Political Ideologies: An Introduction*. New York: Macmillan, 1992.

Kusuma, RM. A.B. *Labirnya UUD 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

[162] **Kontemplasi**, Volume 04 Nomor 01, Agustus 2016

- Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan, 2014.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ma'shum, Saifullah. *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001.
- MS, Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal : Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Zulkifli, Arif, dkk. *Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan*. Jakarta: KPG, 2010 .

JURNAL DAN MAKALAH

- AE Priyono, "Islam dalam Oposisi Demorkatis Indonesia", *Studia Islamika* Vol 2 Nomor 4 tahun 1995
- Azhari, Aidul Fitirciada. "Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945: dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2006
- Fuad, Ahmad Nur "Interrelasi Fundamentalisme Dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer", *Islamica*, Vol. 2, No. 1, September 2007
- Jan-Werner Mueller, "Populisme tanpa Rakyat", *Konstelasi* Vol. 7 No. 36 Desember 2013
- Lasijan, "Gerakan Transformisme Islam di Indonesia", *Jurnal TAPIs* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
- Priyono, Herry-B. "Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan", *makalah*, 10 November 2006
- Tim Redaksi, "Menulis Bibel Sosial Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sosial*

Demokrasi Vol. 11 4 April - Juli 2011

Wasino. "Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok," *makalah*, 30-31 Maret 2009

WEBSITE

<http://www.swarasenayan.com/kaji-ulang-uid-45-penamaan-yang-manipulatif-yang-sudab-diamandemen/> diunduh 20 Mei 2016.

<http://news.detik.com/berita/613090/kwik--wiranto--cs-deklarasikan-perhimpunan-nasionalis-indonesia> diunduh 20 Mei 2016.

<http://paramadina.or.id/sejarah/> diunduh 20 Mei 2016.

